

BAB I

PENDAAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Lengayang adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 nagari, yaitu Kambang Timur, Kambang Utara, Kambang Barat, Kambang Tengah, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Timur, dan Lakitan Tengah. Nagari yang memiliki wilayah terluas adalah Nagari Kambang Timur dengan luas wilayah 117,96 km² atau 19,97 % dari luas wilayah Kecamatan Lengayang. Nagari kambang timur merupakan nagari terbesar di wilayah Kecamatan Lengayang dengan mencakup kawasan Hutan Negara di dalamnya atau Taman Nasional Kerinci Seblat.¹

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi masa lalu, masa kini, dan bahkan juga bermanfaat untuk generasi pada masa yang akan datang. Paradigma bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang harus pula diubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, tetapi

¹ BPS. *Lengayang dalam Angka 2018*. Painan: BPS, 2018

merupakan titipan anak cucu. Hutan dapat memberikan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi.²

Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) salah satu kawasan konservasi yang berbentuk Taman Nasional di Indonesia, yang kawasannya meliputi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Sebagian kawasan TNKS di Sumatera Barat terdapat di kampung Koto Pulai, nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 nagari, yaitu Kambang Timur, Kambang Utara, Kambang Barat, Kambang Tengah, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Timur, dan Lakitan Tengah. Nagari yang memiliki wilayah terluas adalah Nagari Kambang Timur dengan luas wilayah 117,96 km² atau 19,97 % dari luas wilayah Kecamatan Lengayang, merupakan nagari terbesar di wilayah Kecamatan Lengayang dengan mencakup kawasan Hutan Negara di dalamnya atau Taman Nasional Kerinci Seblat.³

Kawasan hutan TNKS yang terdapat di kampung Koto Pulai merupakan tanah ulayat dari berbagai suku. Biasanya tanah ulayat di Minangkabau digarap oleh anak kemenakan untuk mendapatkan kehidupan. Tumpang tindih dalam pengaturan tanah ulayat dan TNKS telah menjadi faktor munculnya konflik sosial di masyarakat Koto Pulai. Sejak ditetapkannya kawasan hutan Koto Pulai sebagai TNKS pada tahun 1996 sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan No.192/Kpts-II/1996, menyebabkan masyarakat di sekitar Koto Pulai tidak boleh secara bebas melakukan akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

² Ahmad Redi. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 1.

³ BPS. *Lengayang dalam Angka 2018*. Painan: BPS, 2018.

hutan yang ada seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada masa lampau, seperti mengolah pertanian sawah, ladang, menebang hutan, dan sebagainya. Padahal masyarakat telah mendiami kawasan hutan nagari dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada sejak sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan tidak jelasnya tapal batas taman nasional dengan kampung-kampung yang ada di sekitar kawasan TNKS. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah masuknya berbagai aspek kepentingan sosial ekonomi. Fenomena di atas telah membawa dampak pada munculnya konflik sosial antara kepentingan pemerintah yang dalam hal ini Unesco untuk melakukan konservasi dan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan kepastian tapal batas taman nasional. Selain konflik antara rakyat dan pemerintah dalam pengelolaan TNKS, saat ini seiring dengan semangat otonomi daerah telah pula memunculkan keinginan daerah agar diberi kewenangan dalam mengelola sumberdaya hutan di kawasan TNKS.

TNKS dikelola Badan Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) yang dianggap oleh pemerintah daerah hanya mengikuti keinginan pemerintah pusat tentang pengelolaan hutan. Akibatnya muncullah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Disamping konflik diatas, ada lagi fenomena intervensi dari dunia internasional (Bank Dunia dan IMF), lembaga internasional tersebut dalam konservasi di Indonesia ternyata mempunyai pengaruh yang besar

melakukan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk pelestarian sumber daya alam, yang berdampak pada pemberian pinjaman luar negeri.⁴

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadinya perambahan hutan di bumi Pesisir Selatan ini, bukan saja dilakukan sepihak oleh siperambah tetapi karena adanya pihak lain yang membutuhkan pasokan kayu. Kegiatan tersebut lebih ditujukan pada penebangan liar dan pencurian kayu, yang dilakukan oleh masyarakat karena ada pihak –pihak lain yang menampungnya, bahkan tidak jarang mereka menerima uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas tersebut, seperti di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar).⁵ Sehubungan dengan itu kebanyakan penduduk di daerah tersebut mengantungkan kehidupan dan perekonomiannya dari hasil hutan terutama kayu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, topik ini menarik untuk mengkaji tentang pengelolaan Hutan Negara oleh masyarakat dan pemerintah antara kebutuhan dan hukum yang berlaku. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum ditetapkan sebagian wilayahnya sebagai TNKS pada 1996 dan sesudah ditetapkan sebagai TNKS setelah 1996 dan dampak yang terjadi adalah tumpang tindihnya peraturan dan batas wilayah antara TNKS dan wilayah kampung Koto Pulai, nagari Kambang Timur. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkan judul tentang **“Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang Timur , Kecamatan Lengayang, Kabupaten**

⁴“Konflik Kepentingan Dibalik Konservasi Studi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi”. Jambi : *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, Vol 2. 2010.

⁵ "[Pergerakan-Kayu-Ilegal-Marak-di-Kambang-Aparat-Terkait-Mendapat-Kritikan](http://relasipublik.com//)". <http://relasipublik.com//> diakses pada 26 Agustus 2019.

Pesisir Selatan Dan Prilaku Masyarakat Terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat 1996-2018”. Fokus penelitian ini adalah mengenai perilaku dan pelanggaran hukum oleh masyarakat Kambang Timur yang berada diwilayah sekitar Hutan Negara atau Taman Nasional Kerinci Seblat.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh batasan spasial dan temporal. Batasan spasial penelitian ini adalah Kampung Koto Pulai, nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan kampung ini sebagai batasan spasial adalah karena penduduk Koto Pulai banyak mengolah hutan TNKS sebagai sumber mata pencaharian hidup mereka. Batasan temporal penelitian ini adalah dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2018. Alasan di ambil batasan awal tahun 1996 adalah karena pada tahun 1996, adanya penetapan secara resmi Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai Taman Nasional oleh Menteri Kehutanan dengan SK Menteri Kehutanan No.192/Kpts-II/1996 Pada Tanggal 12 November 1996.⁶ Penetapan tersebut berdasarkan pada nomor registrasi UNESCO yang menyetujui kawasan tersebut sebagai TNKS.

Pemilihan batas akhir tahun 2018, beralasan karena pada tahun ini perusakan hutan dikawasan TNKS di Koto Pulai terus mengalami kerusakan, salah satu contoh kasus perambahan yang terungkap pada bulan oktober 2018 yang dilakukan oleh 12 orang pelaku, kasus ini masih dalam proses oleh Polres Pesisir Selatan (**Siaran Pers Walhi Sumatera Barat / Nomor :196 /ED-WSB/XII/2018**). Peningkatan jumlah kerusakan dari tahun ke tahun dan masih

⁶Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE), *Konflik Kepentingan Dibalik Konservasi Studi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi*, Vol 2. 2010.

banyaknya terjadi kasus perusakan hutan pada tahun 2018 oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang datang dari luar. Kondisi tersebut diperparah dengan usaha pemerintah daerah yang mengupayakan pembangunan jalan raya antara Kambang dan Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, melewati kawasan TNKS. Tujuan Pemda membangun jalan raya Kambang –Muara Labuah adalah dengan alasan sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan dan budaya.

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah kondisi Sosial Ekonomi Kampung Koto Pulai ketika pertama kali menjadi bagian dari kawasan TNKS?
2. Bagaimana sejarah penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat dan apa konflik yang terjadi setelah penetapan TNKS?
3. Apakah TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) bermanfaat bagi masyarakat Kampung Koto Pulai ?
4. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik antara TNKS dan masyarakat Kampung Koto Pulai ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi Kampung Koto Pulai ketika pertama kali menjadi bagian dari kawasan TNKS, manfaat TNKS (TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT) bagi masyarakat Kampung Koto Pulai, dan mendeskripsikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik antara TNKS

dan masyarakat Kampung Koto Pulau. Selain itu juga bertujuan untuk mengungkapkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Koto Pulau terhadap TNKS sebagai hutan negara yang berada di wilayah Kampung Koto Pulau.

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah Hutan Negara TNKS. Masih banyak penduduk petani Kambang Timur yang tidak mengetahui pelanggaran hukum di kawasan lingkungan alam TNKS. Jika kasus ini dibiarkan dan tidak ada pengembangan dan penindakan terhadap pelaku ilegal logging, perambahan hutan atau perusakan hutan lainnya, besar kemungkinan pelaku akan terus melakukan kerusakan dalam kawasan hutan dan bisa mengakibatkan bencana alam.

D. Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk kedalam kajian sejarah sosial ekonomi. Dalam kajian ini mengkaji pola perubahan sosial ekonomi di Nagari Koto Pulau dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan adanya perubahan dari hutan yang dikelola masyarakat menjadi kawasan hutan lindung. Studi sejarah sosial ekonomi merupakan gejala sejarah yang memperlihatkan dalam kehidupan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, keluarga, pendidikan, dan gaya hidup.⁷ Kuntowijoyo mengemukakan sejarah sosial ekonomi mempunyai garapan yang sangat luas dan beragam, kebanyakan sejarah sosial mempunyai hubungan yang

⁷ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dan Metodologi Sejarah..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 50.

erat dengan sejarah ekonomi.⁸ Sejarah sosial ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi masa depan. Sebagaimana yang dikemukakan Kuntowijoyo bahwa peranan sejarah sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat antara lain untuk penentu kebijakan dalam sosial ekonomi maksudnya adalah untuk meneropong masa depan dengan menggunakan pola kajian masalah yang telah lalu. Sejarah sosial dan ekonomi juga mempunyai peranan yang sama. Sering kali orang melakukan kebijakan ekonomi untuk memperbaiki keadaan yang akan datang dengan melihat sejarah perekonomian yang telah lalu.⁹ Munculnya konflik dan perubahan pola kehidupan masyarakat karena perbedaan kepentingan terhadap hutan dan kebutuhan masyarakat terhadap hutan.

Sejarah ekonomi secara garis besar mempunyai pengertian sebagai kegiatan dan keadaan perekonomian suatu masyarakat pada masa lampau. Sedangkan secara spesifik dapat dikatakan, sejarah ekonomi adalah studi tentang perekonomian berevolusi dari sebuah sudut pandang sejarah. Menurut Mestika Zed dan Emrizal Amri sejarah ekonomi mengkaji tentang bagaimana cara manusia memuaskan kebutuhan materilnya di masa lampau, sambil memperhatikan sarana-sarana yang dapat mereka gunakan dan memaksa mereka mengadakan suatu pilihan.¹⁰

Kemudian Sindung Haryanto, sejarah ekonomi memusatkan perhatian pada aktivitas perekonomian suatu kelompok masyarakat khususnya masalah

⁸ Koentowidjoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm 33.

⁹ *Ibid.* Hal. 35.

¹⁰ Mestika Zed dan Emrizal Amri. *Sejarah Sosial Ekonomi Jilid I*, (Padang: UNP Press, 1994), hlm 36.

pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu, distribusi pendapatan, arah pertumbuhan dan kemunduran serta masalah berbagai kelompok pada masa lampau. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejarah ekonomi secara garis besar mempunyai pengertian sebagai kegiatan dan keadaan perekonomian suatu masyarakat pada masa lampau. Sedangkan secara spesifik dapat dikatakan, sejarah ekonomi adalah studi tentang bagaimana perekonomian berevolusi dari sebuah sudut pandang sejarah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas kajian sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu yang melibatkan masyarakat ekonomi atau keduanya. Selain itu sosial-ekonomi mesti mempunyai unsur-unsur ekonomi sosial, jadi sosial-ekonomi yang dimaksud sebagai suatu yang berkaitan dengan masyarakat dan ekonomi yang melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan ekonomi.

Hutan dan lingkungan bagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika hutan makin rusak, lingkungan terancam, dan bencana punterjadi; banjir, longsor, terjadi dimana-mana. Hal ini tidak saja merusak rumah, harta bendaan infrastruktur lainnya, tetapi juga mengancam jiwa manusia, bahkan ketika bencana itu terjadi tidak sedikit yang menelan korban jiwa. Di sini tergambar bahwa fungsi hutan menjadi sangat vital bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam arti, hutan sebagai pengendali kerusakan ekosistem. Jika hutannya rusak maka akan cepat sekali

¹¹ Sindung Haryanto. *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil, disebut sebagai paru-paru dunia.¹²

Pentingnya hutan tropis sebagai paru-paru dunia sudah menjadi perhatian banyak pihak. Daya tarik hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, telah mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, karena setiap hari hutan ditebang, tanpa ada upaya untuk menjaga pelestariannya. Kondisi hutan Indonesia sekarang sangat kritis, akibat ulah kelompok pengusaha dan masyarakat yang tidak menyadari arti penting hutan bagi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan kehidupan manusia. Kondisi kritis ini, diantaranya akibat kegiatan manusia yang suka menebang hutan atau yang disebut *illegal logging*, tanpa menanamnya kembali. Nilai strategis hutan dapat didefinisikan dalam artian ekonomis dan sosial. Fungsi ekonomis hutan adalah untuk menjamin masuknya pendapatan, tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang, karena tingkat penurunan cadangan hutan di Indonesia yang sangat pesat akan mengurangi regenerasi hutan. Lahan hutan Indonesia berdasarkan data tahun 1995 dan 1997, mengalami penurunan, yaitu berkurang 1,8 juta hektar setiap tahun.¹³

Fungsi hutan dari sudut sosial adalah sebagai sarana adaptasi (*adaptation*) masyarakat sekitar hutan yang kaya akan nilai-nilai hakiki, pengetahuan lokal (*local genius*), kultural, rekreasi, dan estetika yang dikaitkan dengan hutan. Jika hutan mengalami kerusakan maka keberadaan potensi masyarakat itu juga akan

¹² “Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Dalam *Indonesian Journal For Sustainable Future*, Vol. 1 No. 2.

¹³ “Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Dalam *Indonesian Journal For Sustainable Future*, Vol. 1 No. 2.

makin terancam. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada gangguan keseimbangan ekologis yang dilakukan oleh manusia, serta dapat mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.¹⁴

Ada beberapa konsep yang perlu diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian ini didekati dengan pendekatan sejarah sosial dan sejarah ekonomi, yang mengkaji tentang proses hubungan timbal balik antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, serta terdapat berbagai aspek kehidupan, diantaranya aspek sosial dan ekonomi.¹⁵ Konsep yang dimaksud adalah Taman Nasional, hutan larangan, kehidupan masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan hutan dan kerusakan hutan.

E. Tinjauan Pustaka

Buku yang ditulis Agung Wiyuno dkk, yang berjudul *Kehutanan Multipihak*, membahas tentang pengelolaan hutan yang banyak sekali adanya pelanggaran yang terjadi yang tidak ditindak tegas dan masih berlangsung sampai sekarang, dibuku ini dimuat kasus-kasus dan konflik tentang pengelolaan hutan.¹⁶

Karya yang ditulis oleh Yuliana Cahya Wulan yang berjudul "*Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*", yang membahas berbagai konflik kehutanan yang ada di Indonesia.¹⁷

Buku yang ditulis oleh Asung Uluk, yang berjudul *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*, membahas tentang kondisi masyarakat Dayak terhadap

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Sartono Kartodirdjo. *Opcit*, hlm. 50.

¹⁶ Agung Wiyuno, dkk. *Kehutanan Multipihak*". Jakarta: Cifor. 2001.

¹⁷ Yuliana Cahya Wulan. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Jakarta:Cifor.2004.

ketergantungannya terhadap Taman Nasional Kayan Mentarang, Buku ini sebagai pembanding oleh penulis dalam melakukan penelitian.¹⁸

Buku yang ditulis oleh Drs. Herimanto, Mpd., M.Si. dan Winarno, S.Pd., M.Si., berjudul *Ilmu Sosial dan Budaya dasar*, membahas tentang kehidupan sosial budaya secara dasar.¹⁹

Buku yang ditulis oleh Edwin M. Loeb, yang berjudul, *Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya* membahas tentang kondisi masyarakat Sumatera mulai awal sejarah masyarakat, adat istiadat dan sosial ekonomi²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Yulfri Kurniawan, yang berjudul, “Eksplorasi Kayu dan Kehidupan Sosial-Ekonomi Tukang Tarek di Desa Siluluk Sei. Lansat Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1991-2000)”, membicarakan kehidupan tukang tarek yang bergantung kepada hutan di wilayahnya, yang merusak lingkungan sekitar.²¹

Zurmailis, dalam karyanya yang berjudul “Pemanfaatan Hutan di Siaur Sawahlunto Sijunjung (1969-1997)”, membicarakan pengelolaan hutan oleh masyarakat Siaur Sawahlunto Sijunjung”.²²

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

¹⁸ Asung Uluk. “Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang”. Jakarta; Cifor. 2001.

¹⁹ Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

²⁰ Edwin M. Loeb. *Sumatera: Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013

²¹ Yulfri Kurniawan. “Eksplorasi Kayu dan Kehidupan Sosial-Ekonomi Tukang Tarek di Desa Siluluk Sei. Lansat Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1991-2000)”. Padang : Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas: Padang, 2003.

²² Zurmailis. “Pemanfaatan Hutan di Siaur Sawahlunto Sijunjung (1969-1997)”. Padang : Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas: Padang, 2001.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²³ *Pertama*, tahapan heuristik yaitu tahapan dengan mengumpulkan sumber baik sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip akan dikumpulkan di Badan Statistik Kabupaten Pesisir Selatan berupa Kecamatan Lengayang Dalam Angka 2018, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat, Kantor Kearsipan kota Padang, Badan Pusat Statistik Kota Padang, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Ilmu Budaya (Koentowidjoyo. *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), Pustaka universitas Andalas, dan lain-lain.

Sumber Sekunder terdiri dari buku, laporan penelitian, maupun artikel atau jurnal Penelitian lapangan mengandalkan metode wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah orang-orang yang bersangkutan dengan masalah ini, wawancara dengan pemuka adat, masyarakat sekitar, pegawai setempat, petani penggarap hutan, dan pemerintah daerah. *Kedua*, Tahapan kritik untuk menemukan keabsahan sumber yaitu melalui kritik intern untuk membuktikan sumber-sumber tersebut asli atau bukan. Kritik ekstern adalah pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sumber intern adalah pengujian terhadap isi dari sumber.

Ketiga, Tahapan interpretasi dengan mengelompokkan dan menerangkan fakta sehingga mempunyai hubungan dan makna dalam penjelasan. Kemudian,

²³ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1986,, hlm.32.

tahapan keempat, dalam metode sejarah yaitu historiografi (penulisan sejarah) untuk menghasilkan karya sejarah. Historiografi yaitu menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuannya dalam suatu penulisan utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mengorganisir penulisan ini maka disusun sistematika, sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang membahas tentang Latar belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Analisis, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Bahan Sumber, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan Gambaran tentang Kampung Koto Pulai, baik dalam bentuk Letak Geografis, Penduduk dan mata pencarian, Sistem Sosial Budaya Masyarakat, dan Kehidupan Keagamaan.

Bab III : Menjelaskan tentang Taman Nasional Kerinci Seblat, yang dimulai dengan Hutan Jambi dan Sumatera Barat, Berdirinya TNKS, Visi dan Misi TNKS, Penetapan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia, pelanggaran yang terjadi di wilayah TNKS seperti penebangan liar, perambahan, pembuatan jalan menembus kawasan TNKS dan upaya pelestarian yang dilakukan oleh pihak TNKS, Pemerintah dan Masyarakat Koto Pulai, Nagari Kambang Timur.

Bab IV : Menjelaskan tentang Profil masyarakat yang berperan terhadap wilayah TNKS.

BAB V : Adalah kesimpulan tentang jawaban-jawaban pertanyaan yang telah diajukan dalam lingkup permasalahan.